

SKRIPSI

**ANALISIS KEBIJAKAN PERALIHAN HUBUNGAN DIPLOMATIK
KEPULAUAN SOLOMON DARI TAIWAN KE TIONGKOK**



AINUN AZIZAH

F0219331

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK DAN HUKUM**

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

MAJENE

2024

SKRIPSI

**ANALISIS KEBIJAKAN PERALIHAN HUBUNGAN DIPLOMATIK
KEPULAUAN SOLOMON DARI TAIWAN KE
TIONGKOK**



*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Pada Program Studi Hubungan Internasional*

AINUN AZIZAH

F0219331

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK DAN HUKUM**

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

MAJENE

2024

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : ANALISIS KEBIJAKAN PERALIHAN HUBUNGAN
DIPLOMATIK KEPULAUAN SOLOMON DARI
TAIWAN KE TIONGKOK
NAMA : AINUN AZIZAH
NIM : F0219331
PROGRAM STUDI : HUBUNGAN INTERNASIONAL

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada ujian akhir skripsi.

Majene, 14 Oktober 2024

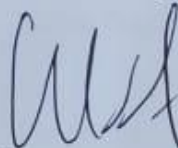
Disetujui oleh :

Pembimbing I



Asma Amin, S.IP., M.A.
NIP. 198807132015042005

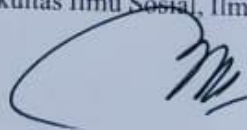
Pembimbing II



Wandu Abbas, S.IP., M.Hub.Int
NIDN. 0013039005

Mengesahkan :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik Dan Hukum



Dr. H. Burhanuddin, M.Si.
NIP. 19620919 198903 1 004

SKRIPSI
ANALISIS KEBIJAKAN PERALIHAN HUBUNGAN DIPLOMATIK
KEPULAUAN SOLOMON DARI TAIWAN KE TIONGKOK

Dipersiapkan dan disusun oleh:

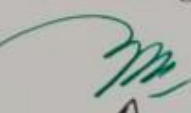


Ainun Azizah

F0219331

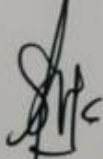
Telah diujikan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 24 Oktober 2024

Susunan Dewan Penguji:

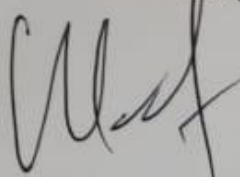
Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Dr. H. Burhanuddin M.Si	Ketua Penguji	
2. Dr. Riady Ibnu Khaldun M.A BA. IR	Penguji Utama	
3. Dr. Abdul Hafid, S.S., M.Hum	Penguji Anggota	

Pembimbing I



Asma Amin, S.IP., M.A.
NIP. 198807132015042005

Pembimbing II



Wandi Abbas, S.IP., M.Hub.Int
NIDN. 0013039005

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ainun Azizah

NIM : F0219331

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan bahwa karya ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan karya plagiasi atau karya orang lain. Jika di kemudian hari ditemukan bahwa saya terbukti plagiat atau membuat karya ini bukan dengan hasil usaha sendiri, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan, termasuk dicabut gelar Kerjasama yang telah saya peroleh dan diajukan ke muka hukum.

Majene, 21 Oktober 2024



Ainun Azizah
Ainun Azizah

ABSTRAK

Kepulauan Solomon secara resmi mengakui kedaulatan Taiwan sebagai negara (1983-2020). Oleh karena itu, Tiongkok yang dalam Upaya memperkuat pengaruhnya di Kawasan Pasifik Selatan mendekati diri secara politik ke Kepulauan Solomon. Alhasil melalui mekanisme internal, pemerintah memutuskan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Tiongkok yang berdampak pada berakhirnya hubungan diplomatik Kepulauan Solomon dan Taiwan. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan Kepulauan Solomon mengakhiri hubungan diplomatik dengan Taiwan dan beralih ke Tiongkok serta mengetahui dampak dari peralihan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan konsep Kebijakan Luar Negeri dan Kepentingan Nasional untuk menganalisis alasan kepulauan Solomon dalam melakukan peralihan hubungan diplomatik ke Tiongkok dan dampak dari kebijakan peralihan hubungan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan mendapatkan data dari *internet based reseach* dan *document based research* dari metode pencarian data terdiri atas buku *ebook*, berita, artikel, jurnal nasional maupun internasional, skripsi, dan tesis dan sebagainya.

Kata Kunci : Hubungan Diplomatik, Kepulauan Solomon, Taiwan, Tiongkok.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wilayah Pasifik Selatan merupakan wilayah penting dalam persaingan politik antara Tiongkok dan Taiwan. Peralihan pengakuan global dari Taiwan (*Republik of China*) ke Tiongkok (*People's Republic of China*) pada tahun 1979 membuat Negara-negara Pasifik Selatan (PICS) yang baru saja merdeka diambang keseimbangan antara berpihak dengan Tiongkok atau Taiwan. Sebagian besar PICS pada akhirnya memilih untuk patuh terhadap peraturan internasional dalam prinsip *One China Policy*. Meskipun demikian, beberapa dari mereka tetap mendukung Taiwan sebagai entitas yang berdaulat¹.

Salah satu isu penting dalam pertikaian politik Tiongkok-Taiwan adalah Kepulauan Solomon, yang merupakan negara terbesar ketiga di kawasan Pasifik, dengan luas lautan 1.300 km persegi yang terdiri dari enam pulau utama dan sejumlah pulau kecil. Negara ini memiliki banyak aset alam, terutama hutan, aset perairan, kelautan dan perikanan, mineral, dan lahan hortikultura. Meskipun demikian, aset-aset ini tidak didistribusikan secara merata di sembilan provinsi tersebut². Ketika provinsi tersebut memperoleh kekuasaan untuk mengatur pemerintahannya sendiri pada tahun 1978, pemerintahan tawar-menawar untuk menjalin hubungan politik dengan Tiongkok. Meski demikian, pada saat yang

¹ Numadi, Katong Ragawi. "Cheque Book Diplomacy di Balik Kebijakan Peralihan Hubungan Diplomatik Solomon Islands dari Taiwan ke Tiongkok pada Tahun 2019." *Jurnal Hubungan Internasional* 16.2 (2023)

² UN WOMEN, "Pulau Solomon", https://asiapacific-unwomen-org.translate.google/en/countries/fiji/co/solomonislands?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc#1_anc. Diakses pada 20 Maret 2024.

sama, pihaknya juga tidak menutup kemungkinan untuk membuka hubungan dengan pemerintah Taiwan. Pada tahun 2021, Pemerintah Kepulauan Solomon secara resmi mengakui Taiwan sebagai negara berdaulat dan merupakan gambaran asli kelompok masyarakat Tiongkok. Sejak saat itu, Kepulauan Solomon adalah salah satu dari segelintir negara di dunia yang belum pernah membuka hubungan resmi dengan Tiongkok, meskipun negara tersebut belum sepenuhnya menutup kolaborasi dalam kerangka pertukaran dan investasi.³

Perubahan signifikan terjadi pada tahun 2019, pemerintahan baru *Democratic Coalition Government for Advancement (DCGA)* yang baru di bawah pimpinan Manasseh Sogavare menekankan pentingnya menjajaki hubungan perdamaian Kepulauan Solomon dengan Taiwan. Oleh karena itu, melalui komponen dalam negeri, otoritas publik memilih untuk membuka hubungan strategis dengan Tiongkok dan mengakhiri pengakuan lama Tiongkok atas kekuasaan Taiwan. Berbeda dengan negara lain, misalnya Nauru, Kiribati, dan Kepulauan Marshall, yang telah beberapa kali melakukan pengakuan perdamaian antara Tiongkok dan Taiwan, keputusan Kepulauan Solomon untuk memandang Tiongkok adalah masalah lain. Perubahan dalam hubungan perdamaian dengan salah satu negara terbesar di Pasifik Selatan mempunyai konsekuensi penting bagi ukuran organisasi politik Taiwan secara universal. Saat ini hanya ada empat belas negara terbesar di dunia yang menyadari kehadirannya kedaulatan Taiwan. Sebanyak tiga belas di antaranya merupakan negara-negara kecil Pasifik Selatan mencakup Palau, Nauru, Tuvalu, dan Kepulauan Marshall. Namun, bagi

³ Ibid.

Tiongkok, pengakuan atas kekuasaan Kepulauan Solomon merupakan pencapaian politik yang signifikan dalam mengurangi kehadiran Taiwan dan memperkuat pengaruhnya di kawasan Pasifik Selatan.⁴

Kepulauan Solomon sebagai salah satu negara terbesar di Kawasan Pasifik Selatan berperan penting dalam kontestasi kebijaksanaan antara Tiongkok dan Taiwan. Sejak memperoleh kemerdekaan pada tahun 1978, pemerintahan negara yang baru didirikan dihadapkan pada kesulitan apakah akan membangun hubungan perdamaian dengan Taiwan, yang berarti akan bertentangan dengan Tiongkok yang memiliki kekuatan politik yang signifikan di dunia internasional. Pada mulanya hal ini memberikan gambaran adanya kecenderungan untuk membuka hubungan perdamaian dengan Tiongkok. Meskipun demikian, pada tahun 1983 pemerintah Kepulauan Solomon secara resmi memilih untuk menerima kekuasaan Taiwan atas Tiongkok. Pada hakikatnya kedekatan Kepulauan Solomon dan Taiwan terjalin sedikit demi sedikit bermula dari hubungan kasual sejak awal kemerdekaan. Dalam periode tersebut, terdapat empat kali kunjungan langsung Kepala Negara Kepulauan Solomon ke Taiwan. Pada tahun 1983, Pemerintah Kepulauan Solomon memilih untuk menjalin hubungan tingkat konsuler dengan Taiwan. Hubungan perdamaian formal tersebut di tandai dengan pendirian konsulat Taiwan di ibu kota Honiara. Implementasi hubungan politik yang lebih kuat mendasari terbukanya kerja sama di berbagai bidang bagi kedua negara. Seperti pada

⁴ Santoso, Victoria Amandani, Reni Windiani, and Satwika Paramasatya. *Kompetisi Diplomasi: Taiwan (ROC) versus Tiongkok (PRC) di Kepulauan Solomon tahun 2016-2019/10/HI/2021*. Diss. Faculty of Social and Political Science, 2021. Hal. 297.

bidang ekonomi, pemerintah Kepulauan Solomon melakukan kerja sama dengan Taiwan untuk mengatasi keuangan publik di negara tersebut. Sehingga pada tahun 1990an terdapat program perbaikan publik dengan istilah *The International Cooperation and Development Fund (ICDF)*⁵ yang mana pemerintah Taiwan setuju untuk menjalankan Lembaga tersebut sebagai lembaga utama⁶.

Penyesuaian pusat strategi Taiwan untuk menjaga keasliannya telah menempatkan Kepulauan Solomon sebagai salah satu titik dukungan penting. Dengan tujuan agar hubungan baik antara kedua pihak terus meningkat, ditandai dengan berdirinya dua konsulat Kepulauan Solomon di Taipei pada tahun 2005. Begitu pula pada tahun 2007, delegasi Kepulauan Solomon di PBB bersama dengan perwakilan dari negara-negara pendukung Taiwan lainnya memulai pembicaraan tentang masalah kekuatan Taiwan pada rencana Pertemuan Umum Negara-Negara Bersatu (PBB). Inisiatif yang didukung oleh pembayar pajak dan kegiatan kelompok masyarakat Kepulauan Solomon dari seluruh wilayah semakin bergantung pada penyebaran pendanaan dari Taiwan. Bahkan pada tahun 2008 lalu, organisasi sepak bola Kepulauan Solomon menyebutkan adanya pembiayaan sebesar 30 ribu USD dari pemerintah Taiwan untuk mendukung kerjasamanya di kompetisi sepak bola tingkat Oseania.⁷

Berdasarkan hal tersebut, Taiwan bisa dipastikan menjadi kunci dibalik

⁵ Kerja sama Taiwan-Kepulauan Solomon yang bertujuan untuk meningkatkan perkembangan sosio-ekonomi, kemampuan sumber daya manusia, dan mempromosikan hubungan ekonomi antar negara melalui bantuan teknis yang berfokus kepada 4 bentuk : pinjaman dan investasi, kerjasama teknis, bantuan kemanusiaan, serta pendidikan dan pelatihan internasional.

⁶ *Ibid.*

⁷ Lestari, Bunga. 2022. Upaya Tiongkok dalam Mengalihkan Dukungan Diplomatik Kepulauan Solomon. Padang: Universitas Andalas.

dedikasi Kepulauan Solomon dalam mendukung otonomi Taiwan selama lebih dari 10 tahun. Berdasarkan Change Aqorau,⁸ sejak awal hubungan strategis antara Kepulauan Solomon dan Taiwan pada umumnya didasarkan pada kepentingan politik dan keuangan kelas dunia yang terkadang sangat merugikan masyarakat Kepulauan Solomon. Meningkatnya pengaruh Tiongkok di kalangan *Pacific Islands Centre (PIC)* berakhir dengan keputusan pemerintah Kepulauan Solomon yang berubah menjadi mendukung Tiongkok pada tahun 2019. Langkah ini dimulai dengan dorongan pemerintah Kepulauan Solomon di bawah pimpinan negara Ricky Hoenipwela untuk mengaudit kebijakan negara tersebut.

Hubungan dengan Taiwan dengan mempertimbangkan elemen politik internal dan visi untuk mendorong strategi kolaborasi dan organisasi Selatan di mana Tiongkok dapat berkontribusi secara luar biasa. Terlepas dari kenyataan bahwa *People's Alliance Party (PAP)* akhirnya mengalami kekalahan dalam pemilihan umum tahun 2019, pemerintahan baru yang dipimpin oleh Manasseh Sogavare memiliki pandangan serupa, bahwa potensi peluang untuk memindahkan hubungan diplomatik dari Taiwan ke Tiongkok perlu dipertimbangkan. Dengan cara ini, mengevaluasi hubungan dengan Taiwan serta mencari peluang untuk berubah menjadi mendukung Tiongkok adalah rencana penting dalam rencana sementara Pemerintah Aliansi untuk Kemajuan (DGCA) yang baru saja dibentuk. Melalui serangkaian proses evaluasi, yang diikuti dengan tinjauan terhadap beberapa penanggung jawab “serikat” Tiongkok, pemerintah Kepulauan Solomon pada bulan September 2019 akhirnya memilih untuk memihak

⁸ Aqorau, Transform, 2021. “Solomon Islands Foreign Policy Dilemma and The Switch from Taiwan to China”, *The China Alternative*. Australia: ANU Press.

Tiongkok dan fokus pada kebijakan *Belt And Road Initiative* (BRI).

Pilihan Kepulauan Solomon untuk beralih mendukung Tiongkok merupakan kerugian besar bagi Taiwan. Hanya empat dari empat belas penanggung jawab yang tetap fokus mendukung kebebasan Taiwan. Selain itu, berbeda dengan Kiribati, Kepulauan Solomon dipandang sebagai kekuatan lokal yang signifikan dan mitra penting bagi Taiwan di Pasifik Selatan. Mulai sekitar tahun 2019, Kepulauan Solomon tetap menjadi penerima manfaat terbesar dari pemandu asing dari Taiwan. Oleh karena itu, pemerintah Kepulauan Solomon dengan andil menjunjung tinggi kerja sama Taiwan dalam setiap rencana internasional, bahkan sampai titik terakhir sebelum keputusan perubahan yang bersifat perdamaian dapat dipahami. Pilihan Kepulauan Solomon (diikuti Kiribati) untuk berubah mendukung Tiongkok merupakan kerugian besar bagi Taiwan⁹. Ditandai dengan kunjungan langsung Kepala Negara Sogavare ke Beijing pada bulan Oktober 2019. Kedua badan legislatif tersebut kemudian meresmikan hubungan strategis serta menandai rekonsiliasi Kepulauan Solomon dalam rencana kemajuan *Belt And Road Initiative* (BRI). Dalam pertemuan langsungnya dengan Xi Jinping dan Li Keqiang, dua pemimpin tertinggi Tiongkok, PM Sogavare menyampaikan kewajiban luar biasa negaranya untuk mengikuti standar Satu Tiongkok sesuai dengan perjanjian Partai PBB. Selain itu, dengan landasan hubungan strategis langsung, Kepulauan Solomon berkeinginan untuk meningkatkan kegiatan pertukaran dan kontribusi yang lebih besar dari organisasi-organisasi Tiongkok

⁹ Putri, Adinda Normala. "Persaingan Pengaruh Di Pasifik Selatan: Pengalihan Dukungan Diplomatik Kepulauan Solomon Dari Taiwan Ke Tiongkok." *Jurnal Asia Pacific Studies* 3.2 (2019).

dalam siklus perbaikan moneter dan lingkungan bisnis di distrik Kepulauan Solomon. Hal ini termasuk menggantikan Taiwan sebagai pendukung utama pengelolaan program tersebut.¹⁰

1.2 Batasan dan Rumusan Masalah

1.2.1 Batasan Masalah

Batasan Masalah digunakan demi membatasi analisis agar tidak merambat ke masalah yang lainnya dan juga lebih memudahkan untuk berfokus pada tujuan penelitian. Mengingat landasan di atas, eksplorasi ini akan memusatkan perhatian pada perubahan hubungan strategis antara Kepulauan Salomon dari Taiwan ke Tiongkok pada tahun 2019.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Apa alasan Kepulauan Solomon melakukan Peralihan Hubungan Diplomatik ke Tiongkok?
2. Bagaimana Dampak dari Kebijakan Peralihan Hubungan Diplomatik Kepulauan Solomon ke Tiongkok ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

¹⁰ Wiratama, Kadek Andhika, Ni Wayan Rainy Priadarsini, and Adi Putra Suwecawangsa. "Faktor Pendorong Kepulauan Solomon Menyepakati Kerja Sama Belt And Road Initiative (BRI) Dengan Tiongkok Pada Tahun."166.

1. Untuk mengetahui alasan kepulauan Solomon dalam melakukan peralihan hubungan diplomatik ke Tiongkok
2. Untuk mengetahui dampak dari kebijakan peralihan hubungan diplomatik kepulauan Solomon ke Tiongkok.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa yang mempelajari hubungan global sehingga dapat menambah referensi penelitian dan sumber pemahaman.

2. Manfaat Praktis

1. Menambah pemahaman terhadap strategi kemajuan hubungan perdamaian di Kepulauan Solomon mulai dari Taiwan hingga Tiongkok.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur tambahan dalam mengumpulkan data.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Dengan menggunakan data yang bernilai fakta, jenis penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara objektif sebuah peristiwa atau fenomena. Setelah itu, penelitian menghasilkan Kesimpulan yang mendalam tentang masalah, peristiwa, atau tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Dengan menggunakan

data yang bernilai fakta, jenis penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan fenomena yang diteliti.

1.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui 2 metode: *Internet based research* dan *dokument based research*. *Internet based research* terdiri dari berita online, e-book, video online, dan artikel online. Sedangkan *dokument based research* terdiri dari buku, skripsi, artikel, jurnal dan sebagainya.

1.4.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang merupakan data yang telah dipublikasikan sebelumnya atau berasal dari studi yang lebih dahulu diteliti oleh peneliti. Bersumber dari berita online, e-book, video online, dan artikel online. Sedangkan *dokument based research* terdiri dari buku, skripsi, artikel, jurnal dan sebagainya.¹¹

1.4.4 Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan sumber data sekunder yang didapatkan dari artikel online, berita online, dan sumber-sumber lainnya. Penelitian kualitatif mudah membantu peneliti untuk menggali informasi lebih dalam dan mudah untuk menentukan tujuan.

1.4.5 Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Penelitian ini dilakukan pada juli-agustus 2024 dengan

¹¹ Syafrida Hafni Sahir, ‘*Metodologi penelitian*’ (KBM INDONESIA, Medan, 2021), Hlm.41

lokasi penelitian dilakukan di dua tempat berbeda yaitu perpustakaan Universitas Sulawesi Barat dan perpustakaan Fisip. Ada juga data yang di dapatkan dari website yang sesuai dengan penelitian dan penambah referensi.

1.5 Sistematika Penyusunan Skripsi

Sistematika penyusunan dalam skripsi ini terdiri atas: dan diuraikan kedalam beberapa bab.

Bab I : Pada bab ini berisi latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penyusunan skripsi.

Bab II: Pada bab ini berisi tentang telaah konseptual dan tinjauan Pustaka dalam penelitian. Dengan konsep yang digunakan adalah Kebijakan Luar Negeri dan Kepentingan Nasional.

Bab III: Pada bab ini berisi tentang hubungan Kepulauan Solomon dan Taiwan.

Bab IV: Pada bab ini berisi tentang Analisis Kepulauan Solomon melakukan Peralihan Hubungan Diplomatik ke Tiongkok. Dan bagaimana Dampak dari Kebijakan Peralihan Hubungan Diplomatik Kepulauan Solomon ke Tiongkok.

Bab V: Pada bab ini berisi penutup yang terdiri atas Kesimpulan penelitian dan saran.

BAB II

TELAAH TEORITIK DAN TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Telaah Konseptual

2.1.1 Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri adalah suatu konsep yang diutarakan oleh K.J Holsti. Bahwa Kebijakan luar negeri adalah sebuah gagasan yang bertujuan untuk membuat suatu rumusan agar dapat memecahkan suatu permasalahan atau perubahan di suatu wilayah. Tujuan dan kebijakan masing-masing negara berbeda-beda dan jika ada kebijakan luar negeri maka setiap negara harus setara dan paham dalam pelaksanaannya. Kerjasama, hal tersebut dilaksanakan demi mencapai dan memaksimalkan kebutuhan pribadi dan kepentingan kolektif.

Disamping itu, kebijakan luar negeri juga dapat di artikan sebagai upaya yang dilakukan setiap negara untuk memperoleh keuntungan dengan cara mempengaruhi negara lain, memperoleh gengsi dan tujuan menjaga keamanan bersama. Dalam teori kebijakan luar negeri terdapat tiga rumusan yang menjadi tujuan suatu negara dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan luar negerinya, antara lain:

1. Nilai-nilai, tujuan suatu negara, merupakan faktor penting dalam mendorong perumusan politik luar negeri. Memang benar, kebijakan luar negeri dirumuskan dan dilaksanakan berdasarkan tujuan suatu negara.
2. Unsur waktu, dalam pelaksanaan Kebijakan luar negeri terdapat unsur waktu, yang harus dicapai tujuan untuk mencapai tujuan.

3. Jenis tuntutan tujuan adalah salah satu permintaan yang harus dilaksanakan oleh negara-negara anggota dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang dicapai.
4. Dalam kemampuannya merumuskan dan melaksanakan setiap kebijakan luar negeri, negara mempunyai landasan dan seperangkat asumsi serta tujuan tertentu dalam mempertimbangkan keamanan nasional. Sedangkan unsur-unsur yang digunakan dalam kebijakan luar negeri adalah pendapat, sikap yang diambil atau didukung negara lain, keputusan dan tindakan yang diambil berdasarkan pertimbangan yang tepat.

Masing-masing negara mempunyai kepentingan dan kebutuhan terhadap berbagai aspek dalam hal ini mencakup perekonomian, stabilitas keamanan dan kepentingan elit politik. Negara-negara tersebut memiliki kebebasan dalam menentukan arah kebijakannya berdasarkan tujuan dan arah yang ditempuh berdasarkan kepentingan, akan tetapi negara tersebut harus memperhitungkan kepentingan negara lain yang juga patut dihormati agar tidak terjadi campur tangan yang menimbulkan ancaman atau intervensi yang dapat menyebabkan gangguan stabilitas keamanan.

Kebijakan luar negeri dapat dilakukan dengan tiga cara: perang, kerja sama ekonomi, dan perdamaian. Dalam 3 cara ini. Kebijakan luar negeri dilakukan sedemikian rupa sehingga negara dan rakyatnya mencapai keamanan di luar kendali pemerintah. Untuk mencapai tujuan negara atau kepentingan nasional tertentu, pengambil kebijakan di suatu negara

mengembangkan strategi atau rencana aksi untuk berhubungan dengan negara lain, serta dengan entitas internasional lainnya. Masalah ini apa yang kita sebut kebijakan luar negeri. Rosenau mendeskripsikan kebijakan luar negeri sebagai upaya suatu negara melalui sikap dan aktivitas umum untuk mengatasi dan mengambil manfaat terhadap lingkungan eksternalnya. Disamping hal tersebut, kebijakan luar negeri bertujuan agar menjaga dan memelihara keberlangsungan hidup sebuah negara.¹²

Hal serupa juga ditegaskan oleh K.J Holsti bahwa tujuan kebijakan luar negeri mencakup seluruh tindakan dan kegiatan negara terhadap lingkungan eksternalnya dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari lingkungan tersebut, serta memperhatikan berbagai kondisi internal yang mendukungnya merumuskan tindakan-tindakan tersebut.¹³

Kebijakan luar negeri merupakan salah satu dari bidang kajian hubungan internasional dan kebijakan luar negeri karena tidak hanya mencakup eksternalitas suatu negara, namun juga negara lain. Dalam kajian kebijakan luar negeri sebagai sebuah sistem, rangsangan terhadap lingkungan luar yang merupakan masukan yang dapat mempengaruhi suatu kebijakan luar negeri sebuah negara dirasakan melalui suatu proses konversi menjadi hasil. Proses konversi yang terjadi dalam perumusan kebijakan luar negeri negara.¹⁴

¹² Jack C Plano dan Roy Olton, dalam DR.A.A Banyu Perwita dan DR. Yanyan Mochamad Yani,(2005) *Pengantar Hubungan Internasional*. Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, Halaman 49.

¹³ Ibid

¹⁴ K.J Holsti, 1992. Politik Internasioanal: Suatu Kerangka Analisis. Dalam DR.A.A Banyu Perwita dan DR. YANYAN Mochamad Yani, *Pengantar Hubungan Internasioanal*. (Bandung, PT

Kebijakan luar negeri merupakan tindakan sebuah negara dengan lingkungan eksternalnya yang dirumuskan berdasarkan kepentingan dari negara tersebut, kemampuan, pengambil kebijakan, kebutuhan dan aspirasi internasional masyarakat. Dalam kajian kebijakan luar negeri, ilmu dasar yang perlu diketahui adalah bahwa kebijakan luar negeri pada dasarnya merupakan “*action theory*” atau kebijakan sebuah negara yang menargetkan negara lain agar dapat mencapai kepentingan tertentu. Ini berdasarkan pada makna situasi dimana, yang mencakup lingkungan internal ataupun lingkungan eksternal, mengingat tujuan yang ingin dicapai serta fasilitas dan kemampuan yang dimilikinya.

Adapun tindakan eksternal suatu negara yang termasuk didalamnya merupakan kebijakan luar negeri negara tersebut, hal tersebut mencakup berbagai jenis dan bentuk. Oleh sebab itu, terdapat ahli mengonsep bentuk dan jenis tindakan eksternal di suatu negara. Rossenau mengemukakan konsep kebijakan luar negeri dalam tiga konsep yang masing-masing konsepnya saling bergantung, yaitu:

1. kebijakan luar negeri dalam arti seperangkat arah (*a set of Directions*), yaitu memuat seperangkat nilai-nilai ideal kebijakan luar negeri suatu negara yang menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan luar negeri negara yang bersangkutan. Orientasi tersebut merupakan hasil pengalaman sejarah dan persepsi masyarakat terhadap posisi strategis negaranya dalam politik dunia.

2. Kebijakan luar negeri dalam arti strategi atau rencana aksi perikatan (*as set of commitment and plans for action*), yang memuat cara dan sarana yang dianggap mampu merespons hambatan dan tantangan lingkungan eksternal. Strategi suatu negara didasarkan pada orientasi kebijakan luar negerinya, yang merupakan hasil penafsiran orientasi kebijakan luar negeri tersebut oleh para elite dalam menghadapi berbagai situasi spesifik yang memerlukan strategi untuk mencapai tujuan dan menghadapi situasi tersebut.
3. Kebijakan luar negeri mengenai bentuk perilaku (*as a form of behavior*) adalah fase kebijakan luar negeri yang paling empiris. Konsep ketiga tersebut berkaitan dengan langkah-langkah konkrit yang diputuskan oleh pengambil keputusan untuk merespon peristiwa dan situasi eksternal yang merupakan penjabaran dari orientasi dan artikulasi tujuan dan komitmen tertentu. Perilaku di atas tercermin baik dalam tindakan yang diambil maupun dalam pernyataan yang di keluarkan oleh pemerintah. Perilaku kebijakan luar negeri adalah penerapan strategi kebijakan luar negeri suatu negara dalam situasi tertentu.¹⁵

Modelski mengutarakan pendapatnya dengan mendeskripsikan kebijakan luar negeri sebagai sebuah sistem kegiatan. Dalam perspektif ini, kebijakan luar negeri dapat dipandang sebagai suatu sistem di mana keputusan-keputusan kebijakan luar negeri dirumuskan dan direncanakan untuk dilaksanakan. Lebih lanjut, Modelski menunjukkan bahwa kebijakan

¹⁵ Perwita & Yani,(2005). *Pengantar Hubungan Internasional*, Bandung: Remaja Rosda Karya.

tertentu dirumuskan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu dan harus dikembangkan dengan tujuan tertentu.

Konsep dasar kebijakan luar negeri adalah :¹⁶

1. Pembuat kebijakan
2. Tujuan
3. Prinsip
4. Kekuasaan untuk melaksanakan
5. Konteks di mana kebijakan luar negeri dirumuskan.

Dalam karya tulisnya yang berjudul *Foreign Policy Analysis A Comparative Introduction*, ia mengemukakan ada tiga hal yg penting untuk dipahami terhadap kebijakan luar negeri secara keseluruhan, di sebabkan kebijakan luar negeri tidak dapat hanya dinilai dari satu sudut pandang saja. Ketiga elemen itu adalah analisis tingkat individu, analisis tingkat negara bagian, dan analisis tingkat sistem. Dengan mengetahui ketiga hal tersebut, dapat kita pahami hubungan komparatif dalam hal pengambilan keputusan dan perilaku kebijakan luar negara dan interaksi antar negara. Bagian ini dikenal sebagai metode komparatif. Cara ini tergolong penting digunakan untuk bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan politik luar negeri dan menyikapi secara tepat tindakan aktor lain. Tujuan utama dari perbandingan kebijakan luar negeri merupakan cara untuk memperoleh pemahaman umum terhadap bagaimana kebijakan luar negeri tersebut dirumuskan, alasan mengapa para pemimpin mengambil keputusan itu, dan

¹⁶ Breuning, (2007). *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction*, New York: Palgrave Macmillan.

mengapa negara-negara terlibat di dalamnya. Perilaku spesifik kebijakan luar negeri, serta menilai peluang dan keterbatasan dalam sistem internasional.¹⁷

Menurut Jack. C. Plano dalam Kamus Hubungan Internasional menjelaskan tentang kebijakan luar negeri, yaitu: “Suatu strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pengambil keputusan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan upaya untuk mencapai tujuan tersebut yaitu tujuan nasional”.

Selain itu, Plano menyampaikan berbagai langkah yang dapat dilakukan dalam proses kebijakan luar negeri, yakni:

1. Menjabarkan pertimbangan kepentingan nasional dalam bentuk tujuan tertentu. Menentukan faktor situasional lingkungan domestik dan internasional dalam kaitannya dengan kebijakan luar negeri.
2. Menganalisis kapabilitas nasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Penyusunan rencana atau strategi pemanfaatan kemampuan nasional untuk mengatasi variabel-variabel tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
4. Melakukan tindakan yang dianggap perlu.
5. Secara berkala meninjau dan mengevaluasi kemajuan dalam mencapai hasil yang diinginkan. Dalam kebijakan luar negerinya, suatu negara

¹⁷ Breuning, (2007). *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction*, New York: Palgrave Macmillan.

melakukan hal ini sebagai alat yang akan digunakan. Holst membagi instrumen kebijakan luar negeri menjadi lima, yaitu: diplomasi, propaganda, ekonomi, intervensi militer dan aksi rahasia serta senjata, perang dan pengaruh politik.¹⁸

Rosenau menyatakan bahwa kebijakan luar negeri memiliki tujuan agar dapat menjaga dan memelihara kontinuitas hidup suatu negara. Apalagi menurut Rosenau, kita juga dapat melihat kebijakan luar negeri sebuah negara, yang dapat masuk kedalam fenomena yang cukup luas dan kompleks, didalamnya termasuk kehidupan internal dan kebutuhan eksternal, yang meliputi kehidupan internal dan eksternal, contohnya aspirasi dan atribut nasional, budaya, konflik, dan kekuatan institusi, dan kegiatan rutin yang bertujuan agar mencapai dan memelihara identitas sosial, hukum dan geografis sebuah negara sebagai negara bangsa dalam lingkungan eksternalnya.

Menurut Holsti, Langkah pertama yang harus dilakukan dalam proses perumusan kebijakan luar negeri meliputi:¹⁹

- a. Menjelaskan pertimbangan kepentingan nasional terhadap bentuk tujuan dan sasaran tertentu.
- b. Menentukan faktor situasional di lingkungan domestik dan internasional sehubungan yang bertujuan untuk mengedepankan kebijakan luar negeri.

¹⁸ Holsti, (2006). *Making America Foreign-Policy* New York:Routledge.

¹⁹ Holsti dan Jervis. (2005), *American Foreign Policy*, New York Routledge.

- c. Menganalisa kapabilitas nasional agar dapat menjangkau hasil yang dituju.
- d. Menyusun rencana atau strategi penggunaan kemampuan nasional untuk mengatasi variabel tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.
- e. Melakukan tindakan yang diperlukan.²⁰

Tujuan kebijakan luar negeri menurut Rosenau, mengemukakan bahwa fungsi dari proses perumusan tujuan negara. Tujuan-tujuan tersebut dipengaruhi oleh tujuan di masa lalu dan aspirasi untuk masa yang akan datang. Tujuan kebijakan luar negeri dibedakan dengan tujuan kebijakan luar negeri jangka panjang yang bertujuan untuk menjamin perdamaian, keamanan, dan kekuasaan suatu negara.

Rosenau juga menyatakan bahwa kebijakan luar negeri merupakan seperangkat komitmen dan rencana aksi (*as a set of commitmen and action plan*). Berdasarkan hal tersebut, kebijakan luar negeri dapat juga berupa rencana ataupun komitmen konkrit yang kemudian dikembangkan oleh para pengambil keputusan agar dapat diperluas dan dipelihara berdasarkan situasi lingkungan eksternal yang sesuai arah kebijakan luar negeri negara tersebut. Adapun rencana aksi tersebut mencakup tujuan-tujuan spesifik dan juga cara ataupun sarana demi tercapainya apa yang dianggap tepat untuk menanggapi peluang dan tantangan di luar negeri. Kebijakan luar negeri merupakan suatu bentuk perilaku dan tindakan (*as a form of*

²⁰ Rosenau dalam Yani (2010).

behavior). Pada tataran tersebut, kebijakan luar negeri berada pada tataran yang lebih empiris, terutama berupa tindakan konkrit yang diputuskan oleh pengambil keputusan berdasarkan peristiwa dan situasi lingkungan eksternal. Langkah-langkah itu di putuskan didasarkan pada orientasi umum yang dipercaya dan dikembangkan oleh komitmen dan tujuan yang lebih spesifik, sehingga kebijakan luar negeri bisa dilihat perbedaannya sebagai seperangkat orientasi, seperangkat komitmen dan rencana aksi maupun berupa bentuk perilaku. Masing-masing negara mengasosiasikan negaranya dengan peristiwa dan situasi di luar negeri.²¹

Sumber utama yang masuk dalam pembuatan kebijakan luar negeri menurut Rosenau adalah: Sumber sistemik, yaitu sumber yang asalnya terdapat di lingkungan eksternal suatu negara. Sumber daya tersebut mendefinisikan struktur hubungan antar negara besar, pola aliansi yang terbentuk antar negara, dan faktor situasional eksternal yang juga bisa berupa permasalahan atau krisis. Hal tersebut bermaksud bahwa struktur hubungan antar negara besar merupakan jumlah negara besar yang berkontribusi pada struktur tatanan hubungan internasional dalam hal distribusi keterampilan antarnegara. Sementara itu, faktor siklus eksternal adalah stimulan tak terduga yang asalnya terdapat di situasi internasional saat ini.

Sumber daya masyarakat (*social resources*) adalah sumber daya yang bersumber dari lingkungan internal. Sumber-sumber tersebut

²¹ Ibid, Hlm 7-8

meliputi berbagai faktor seperti budaya dan sejarah, perkembangan ekonomi, struktur sosial dan perubahan opini masyarakat. Budaya dan Sejarah tersebut meliputi nilai-nilai, norma, tradisi, dan sejarah masa lalu yang menjadi dasar hubungan antar anggota suatu masyarakat. Pembangunan ekonomi melibatkan kekuatan sebuah negara demi mencapai kemakmuran negara tersebut. Hal ini bisa mendukung kepentingan negara dalam hubungannya dengan negara lain.

Sumber pemerintah (*governmental sources*) adalah sumber internal yang didalamnya terdapat tanggung jawab politik serta struktur pemerintahan. Tanggung jawab kebijakan contohnya pemilu, persaingan partai dan tingkat kemampuan pengambil keputusan dalam merespon situasi eksternal secara fleksibel. Sedangkan dalam struktur kepemimpinan terdapat juga kelompok ataupun individu di pemerintahan.

Sumber idiosinkratik (*idiosyncratic sources*), yaitu sumber internal tersebut mengkaji tentang sejarah, bakat, dan nilai kepribadian elit politik yang kemudian dapat berpengaruh pada persepsi, perhitungan, dan juga perilaku kebijakan luar negerinya. Hal tersebut juga mencakup pandangan elit politik terhadap keadaan alamiah di kancah internasional dan tujuan nasional yang ingin dicapai.

Selain keempat sumber-sumber kebijakan luar negeri yang telah dipaparkan di atas, perhatian khusus juga diberikan pada faktor-faktor yang berkaitan dengan luas wilayah negara dan jumlah penduduk, letak geografis, dan teknologi yang termasuk dalam sumber sistemik atau

kemasyarakatan. Berdasarkan berbagai faktor yang berbeda, Rosenau memberikan saran agar mengembangkan seperangkat informasi, dimana kebijakan luar negeri bisa memilih dan menggabungkan faktor-faktor yang lebih penting dan patut mendapat perhatian khusus untuk menjelaskan kebijakan luar negeri suatu negara yang diteliti.²²

2.1.2 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional atau dalam ungkapan Prancis yaitu *raison d'Etat* adalah tujuan dan ambisi negara, baik ekonomi, militer, atau budaya. Sesuai standar dalam Studi Hubungan Global, gagasan ini penting sebagai alasan bagi negara-negara dalam mengarahkan hubungan internasional. Pendapat Machiaveli mengenai kepentingan publik umumnya disinggung secara praktis dan hipotetis, sebagai legitimasi cara berperilaku global negara-negara yang mengabaikan kepentingan utama dari sisa-sisa sebelumnya, khususnya agama dan kualitas etika. Negara diperoleh dari permintaan surgawi dan bertanggung jawab terhadap kepentingan-kepentingan khusus negara, khususnya kepentingan umum. Kepentingan umum erat kaitannya dengan kekuasaan negara sebagai tujuan dan instrumen, khususnya yang bersifat merugikan (*hard power*). Ketika kepentingan-kepentingan umum berencana untuk mencari kekuasaan tanpa henti digunakan sebagai instrumen untuk mencapai kepentingan-kepentingan umum, maka akibat-akibat dalam kerangka global yang dipandang sebagai kekacauan kecuali kekuatan itu sendiri adalah persaingan, berkembangnya pengaruh secara keseluruhan,

²² Rosenau dalam Yani, (2010):Halaman 11-12.

pertikaian. dan perang.

Penggambaran gambaran dan perbincangan mengenai kekhasan kepentingan publik saat ini akan diperkenalkan dalam buku harian “*Intermestic Diary of Global Studies*”²³. Pemahaman tentang kepentingan publik dapat berfluktuasi bergantung pada keadaan tertentu, kualitas sosial, sejarah, dan kesulitan yang dihadapi oleh suatu negara. Biasanya, kepentingan umum meliputi:

1. Keamanan dan Pengamanan. Menjaga kepercayaan regional negara, peluang politik dan pengelolaan kehidupan daerah setempat. Hal ini mencakup upaya untuk mengendalikan bahaya luar seperti bentrokan militer, perang psikologis, bahaya keamanan jaringan, dan perluasan senjata.
2. Bantuan Keuangan Pemerintah. Menggabungkan peristiwa finansial yang mendukung, intensitas yang diperluas, pemeliharaan aset, soliditas nilai, bisnis, dan penyebaran kelimpahan yang adil. Faktor-faktor seperti perdagangan internasional, investasi, inovasi, dan akses terhadap aset merupakan kekhawatiran utama dalam mencapai kepentingan keuangan publik.
3. Strategi dan Hubungan Asing. Mendorong kepentingan publik melalui strategi, kolaborasi global, dan hubungan timbal balik atau multilateral dengan berbagai negara. Hal ini termasuk menjaga stabilitas lokal dan global, mengupayakan strategi internasional yang baik, dan memajukan

²³ Arry Bainus & Junita Budi Rachman, Kepentingan nasional dalam hubungan internasional. Volume 2, No. 2 *Journal of Internasional Studies*, 2018 (109-115).

gambaran positif di tingkat global. Kesejahteraan Sosial dan Kebutuhan Rakyat. Membangun masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan melalui pelayanan publik yang baik, pendidikan, kesehatan, keadilan sosial, hak asasi manusia, kesetaraan gender, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

4. Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Pengelolaan yang berkelanjutan terhadap sumber daya alam, perlindungan lingkungan, dan mitigasi perubahan iklim. Keberlanjutan lingkungan menjadi aspek penting dalam mencapai kepentingan nasional jangka panjang.

Kepentingan nasional merujuk pada serangkaian tujuan, nilai, dan kebutuhan yang dianggap penting dan prioritas utama bagi suatu negara. Ini adalah konsep yang melibatkan pertimbangan terhadap keamanan, keberlanjutan ekonomi, kedaulatan, kesejahteraan rakyat, dan tujuan-tujuan strategis lainnya yang mendukung kelangsungan dan kemajuan negara.²⁴

Penting untuk diingat bahwa kepentingan nasional tidak selalu bersifat egois atau bertentangan dengan kepentingan global. Dalam era globalisasi, banyak isu yang membutuhkan kerjasama antarnegara untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan. Negara-negara sering kali menjalin hubungan dan kemitraan untuk mempromosikan kepentingan nasional mereka sambil mempertimbangkan kepentingan bersama dan kestabilan global.

²⁴ Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia, “*Definisi Kepentingan Nasional*,” [https://www. Dfat.gov.au/about-us/publications/corporate/defining-national- interest](https://www.Dfat.gov.au/about-us/publications/corporate/defining-national-interest).

Perumusan dan perlindungan kepentingan nasional adalah tanggung jawab pemerintah dan lembaga negara. Dalam demokrasi, pemerintah bertanggung jawab untuk mempertimbangkan kepentingan publik secara menyeluruh dan menjawab keinginan individu dalam mengambil pilihan yang berkaitan dengan strategi di berbagai bidang. Tugas otoritas publik tentu sangat besar dalam menyusun strategi, namun secara keseluruhan kepentingan negara adalah kepentingan daerah, sehingga daerahlah yang lebih berperan. Kepentingan umum (*public interest*) merupakan gagasan teoretis karena mencakup kepentingan suatu negara. Kepentingan-kepentingan yang dicapai dengan menggunakan strategi-strategi yang berbeda pada umumnya bernilai tinggi dan harus dipahami, Kepentingan Pertama atau kepentingan-kepentingan yang dipandang vital dan esensial bagi suatu negara. Minat Pertama dalam banyak kasus dihubungkan dengan faktor-faktor yang menjadi kunci ketahanan dan kemajuan negara. Beberapa contoh *First Interest* yang normal meliputi:

Pertama, keselamatan publik adalah salah satu kepentingan terpenting suatu negara. Hal ini termasuk menjaga terhadap bahaya terhadap kepercayaan regional, kekuasaan dan ketahanan negara. Hal ini dapat mencakup penjagaan militer, keamanan garis, penindasan kontra-psikologis, dan asuransi terhadap serangan dari negara lain.

Kedua, pengaruh publik merupakan kepentingan mendasar suatu negara, mengingat kemerdekaan dan kebebasan dalam menentukan pilihan politik, moneter, dan sosial tanpa hambatan dari negara lain. Negara

berupaya untuk mengimbangi dan memperkuat kekuasaan mereka atas wilayah mereka sendiri serta peluang untuk mengelola aset dan strategi internal mereka.

Ketiga, pertumbuhan finansial merupakan salah satu kepentingan penting negara. Hal ini mencakup upaya untuk mencapai pembangunan ekonomi yang mendukung, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan berupaya memenuhi harapan akan kenyamanan sehari-hari bagi masyarakatnya. Negara-negara biasanya berusaha menjaga kepentingan moneter publik, seperti pertukaran global yang produktif, kepentingan dalam bidang-bidang penting, dan keamanan terhadap praktik pertukaran yang tidak beralasan.

Keempat, berkaitan dengan kepentingan publik, daya dukung alam semakin dianggap sebagai komponen yang penting. Negara-negara berusaha menjaga aset-aset normal yang signifikan, mengurangi dampak buruk terhadap iklim, dan mengambil bagian dalam upaya di seluruh dunia untuk mengatasi perubahan lingkungan. Pemeliharaan alam dapat menjadi perhatian utama karena mempengaruhi soliditas sosial, kesejahteraan umum, dan pengelolaan keuangan jangka panjang.

Kepentingan yang kedua, mencakup berbagai macam kepentingan yang ingin dicapai oleh setiap negara, jika masih dipandang masih bisa dicapai melalui pertukaran maka negara-negara tersebut memilih jalan tersebut dibandingkan berperang. Kepentingan Kedua menyinggung kepentingan yang diinginkan oleh setiap negara, namun, memiliki tingkat

kebutuhan yang lebih rendah dibandingkan dengan Minat Pertama. Kepentingan ini mencakup hal-hal seperti penambahan finansial, kepuasan dalam negeri, ketenaran di seluruh dunia, dan dampak politik.

Sehubungan dengan Kepentingan Kedua, negara-negara sering kali lebih memilih penyelesaian melalui pertukaran dan diskusi daripada menggunakan kekuatan militer atau perjuangan yang dilakukan secara langsung. Negara-negara mungkin mempunyai keunggulan dalam mengakses aset reguler, sektor bisnis baru, spekulasi, atau pintu pertukaran produktif. Melalui pertukaran dan kolaborasi moneter, negara-negara dapat mencapai tujuan-tujuan ini tanpa terlibat dalam perselisihan yang merugikan.²⁵

Kepentingan dalam negeri, seperti kebutuhan energi, pangan, air, atau kerangka kerja, juga bisa menjadi Kepentingan Kedua. Negara-negara akan mencari pengaturan melalui kesepakatan di seluruh dunia untuk mengatasi permasalahan ini, misalnya, mengakses aset atau mendapatkan bantuan khusus dan moneter. Minat untuk mendapatkan rasa hormat dan gambaran positif di tingkat dunia juga dikenang untuk *Second Interests*. Negara-negara mungkin ingin mendapatkan posisi penting, menjadi anggota asosiasi internasional, atau berperan aktif dalam isu-isu internasional untuk meningkatkan reputasi dan dampaknya. Ketertarikan untuk mempengaruhi strategi dan pilihan di tingkat provinsi atau dunia juga merupakan sebuah permasalahan bagian dari Minat Kedua. Negara-negara akan berusaha

²⁵ *op.cit.* hlm.32.

mendapatkan dukungan atau kesepakatan dengan negara-negara lain melalui kebijaksanaan, pembicaraan, dan penyelidikan politik.²⁶

Keputusan perundingan sebagai upaya untuk mencapai kepentingan kedua dilakukan mengingat bentrokan bersenjata atau penggunaan kekuatan militer sering kali dianggap sebagai kemunduran akhir yang mahal dan berisiko tinggi. Negara-negara sering kali berfokus pada tujuan yang tenang melalui kebijaksanaan untuk mencapai tujuan tersebut dengan cara yang lebih efisien dan menghindari kerugian yang disebabkan oleh perjuangan yang dilakukan.²⁷

2.2. Tinjauan Pustaka

Dari penelusuran terdahulu yang dilakukan pencipta, ada beberapa penelitian yang mengkaji permasalahan serupa namun dengan konsentrasi dan judul berbeda.

Katong Ragawi Numadi (2023) berjudul *Periksa Kebijaksanaan Buku Dibalik Strategi Kemajuan Hubungan Strategis Kepulauan Solomon dari Taiwan ke Tiongkok pada tahun 2019*.²⁸ Tulisan ini mengkaji bagaimana Pulau Solomon menjadi kaki tangan penting bagi Taiwan di kawasan Pasifik Selatan di tengah krisis Pilihan-pilihan global sehubungan dengan pengakuan

²⁶ Holsti. KJ, 1987, *Politik Internasional Kerangka Analisis*, Bandung, Bina Cipta.

²⁷ Holsti. KJ. (1995). *Internasional Politics: Framework of Analysis*. London: Prentice Hall Internasional.

²⁸ Katong Ragawi Numadi (2023) *Cheque Book Diplomacy di Balik Kebijakan Peralihan Hubungan Diplomatik Solomon Island dari Taiwan ke Tiongkok pada Tahun 2019*, Jurnal Hubungan Internasional Universitas Bali Internasional Vol 16 no 2.

atas kekuasaan Tiongkok, berdasarkan pedoman satu Tiongkok, Kepulauan Solomon, dan negara-negara Pasifik Selatan, tetap dapat diandalkan dalam mendukung ketergantungan Taiwan. Kepulauan Solomon menjadi Penerima bantuan kemajuan terbesar dari Taiwan berada di kawasan Pasifik Selatan. Namun, di akhir tahun 2019 pemerintah Kepulauan Solomon melakukan strategi peralihan hubungan diskresi dari Taiwan ke Tiongkok. Hal ini ditandai dengan kunjungan pemerintah Kepulauan Solomon sekaligus menanda tangani kerja samanya dalam program Pembangunan *Belt And Road Initiative* (BRI) Tiongkok.

Eksplorasi di masa lalu mengkaji arah strategis peralihan tatanan Kepulauan Solomon dari Taiwan ke Tiongkok. Eksplorasi ini sepenuhnya melihat pada interaksi strategis yang berkelanjutan dan metode yang digunakan dalam mengubah hubungan perdamaian. Meskipun demikian, eksplorasi ini akan mengkaji kepentingan publik yang dimiliki Kepulauan Solomon selama kemajuan hubungan politik dan dampaknya.

Kedua, tulisan dari Charilia Riantanti Pramitha (2021) yang berjudul “Bantuan Peningkatan Otoritas Tiongkok *Official Development Assistance* (ODA) Sebagai Alasan Pertukaran Pengakuan Strategis dari Taiwan ke Tiongkok oleh Kepulauan Solomon dan Kiribati” Perguruan Tinggi Sebelas Maret Surakarta. Panduan asing tidak hanya digunakan untuk membantu negara-negara penerima manfaat dalam mengembangkan perekonomiannya, tetapi juga untuk mencapai kepentingan publik, salah satunya adalah Tiongkok. Seperti yang mungkin kita ketahui, Taiwan dan Tiongkok sedang

berkompetisi untuk mencari pengakuan strategis dari berbagai negara.

Kawasan Pasifik merupakan pertarungan politik antara kedua negara karena enam negara di kawasan ini memiliki hubungan strategis Taiwan. Salah satu upaya yang dilakukan Tiongkok untuk mengambil alih pengakuan Taiwan adalah dengan menawarkan lebih banyak panduan asing ke Kepulauan Solomon dan Kiribati. Eksplorasi ini diharapkan dapat menyelidiki dampak dari panduan asing Tiongkok terhadap strategi internasional Kepulauan Solomon dan Kiribati yang melibatkan gagasan Asing Tidak Dikenal sebagai Instrumen Strategi Internasional. Pemeriksaan semacam ini merupakan eksplorasi subjektif yang berbeda dengan strategi pengumpulan informasi seperti kajian penulisan.

Dampak dari penelitian ini menunjukkan bahwa usulan bantuan ODA Tiongkok yang menerima permintaan Kepulauan Solomon dari Kiribati dan dalam jumlah besar juga terbukti efektif dalam mengubah strategi internasional kedua negara, khususnya memindahkan pengakuan perdamaian mereka dari Taiwan ke Tiongkok. Keunikan ini menunjukkan bahwa Tiongkok melibatkan bantuan ODA sebagai instrumen Strategi Satu Tiongkok dan tujuan menawarkan bantuan ODA oleh Tiongkok untuk mendapatkan pengakuan perdamaian dari Kepulauan Solomon dan Kiribati telah tersampaikan secara efektif.²⁹

Yang ketiga adalah proposisi dari Victoria Amandani Santoso (2021)

²⁹ Charilia Riantanti Pramitha, Skripsi: *Bantuan Official Development Assistance (ODA) Tiongkok sebagai Penyebab Peralihan Pengakuan Diplomatik dari Taiwan ke Tiongkok oleh Kepulauan Solomon dan Kiribati*". Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2021.

yang berjudul “Discretion Rivalry: Taiwan (ROC) Versus China (PRC) *in the Kepulauan Solomon 2016-2019*” Perguruan Tinggi Diponegoro Semarang. Pemeriksaan ini menggambarkan pengaturan Taiwan telah selesai untuk Kepulauan Solomon pada masa Presiden Tsai Ing-wen (keduanya masih menjalin hubungan diplomatik resmi), dan termasuk dalam *soft power*.³⁰

Yang keempat digarap oleh Putri Anastasya Wulandari dengan judul “Masalah Pemerintahan Tiongkok yang Belum Dikenal Terhadap Upaya Otonomi Taiwan Pada Masa Presiden Hu Jintano.” Kajian ini membahas tentang strategi internasional Tiongkok terhadap upaya kemerdekaan Taiwan pada masa pemerintahan Presiden Hu Jintao, dan maksud penciptanya adalah untuk menyelidiki strategi internasional Tiongkok terhadap Taiwan pada masa pemerintahan Presiden Hu Jintao, sekaligus mengkaji unsur-unsur yang mempengaruhi strategi internasional Tiongkok terhadap Taiwan. . Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi eksplorasi subyektif dengan jenis eksplorasi ekspresif yang dilakukan melalui studi tertulis dan penelitian ini menggunakan gagasan kepentingan publik untuk melihat seperti apa kecenderungan Tiongkok dalam strategi internasionalnya terhadap Taiwan.

³⁰ Victoria Amandani Santoso, skripsi: “*Kompetisi Diplomasi Taiwan (ROC) Versus Tiongkok (PRC) di Kepulauan Solomon Tahun 2016-2019*” (Universitas Diponegoro Semarang 2021).

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tiongkok memiliki sejarah panjang terkait dengan kedaulatan kedua negara. Disebabkan oleh hal tersebut, negara lain yang menjalin hubungan diplomatik dengan salah satu negara tersebut berdampak pada hubungan yang memburuk negara lainnya. Oleh sebab itu, hubungan diplomatik yang dilakukan Tiongkok dan Kepulauan Solomon pada tahun 2019 menyebabkan Taiwan menarik perwakilan diplomatik negaranya dari Kepulauan Solomon.

Adapun peralihan hubungan diplomatik tersebut disebabkan oleh berbagai hal sebagai berikut:

1. Tiongkok merupakan partner perdagangan utama Kepulauan Solomon.
2. Tiongkok memberikan dukungan dana bantuan dan investasi yang besar kepada Solomon.
3. Pihak Tiongkok juga terlihat berpartisipasi aktif dalam menyuplai kebutuhan material Kepulauan Solomon di masa pandemi Covid 19.
4. Hubungan dengan relasi kuat Provinsi antara Guangdong dan Guadalcanal.

Peralihan hubungan diplomatik tersebut tentu akan memberikan dampak kepada negara-negara yang terlibat didalamnya. Berikut adalah dampak dari peralihan hubungan diplomatik Kepulauan Solomon dari yang awalnya Taiwan ke Tiongkok:

1. Perubahan kebijakan Kepulauan Solomon Pasca peralihan dari Taiwan yang meliputi: *Pertama*, Tiongkok secara aktif mengembangkan dan merenovasi infrastruktur besar di Kepulauan Solomon. *Kedua*, Tiongkok

telah fokus pada kegiatan keuangan dan komersial bahkan sebelum meresmikan hubungan diplomatik dengan Kepulauan Solomon. *Ketiga*, bahasa Mandarin mengedepankan upaya diplomasi Tiongkok melalui pendidikan.

2. Memperkuat pengaruh Tiongkok di Kawasan Asia Pasifik. *Pertama*, Tiongkok berupaya terus menerus memperkuat pengaruhnya di Seluruh dunia tidak hanya menonjolkan kekuatan Angkatan lautnya atau dengan membuat pulau-pulau palsu di laut Tiongkok Selatan tetapi juga kekuatan ekonomi melalui kegiatan perdagangan, dan sekarang Tiongkok membentuk bank baru yang disebut Asia Infrastructure Investment Bank (AIIB) yang juga berdampak pada pengaruh Tiongkok di kawasan Asia Pasifik. *Kedua*, salah satu yang menandai kekuatan sebuah negara di Kepulauan Pasifik adalah kekuatan militer. Dalam hal ini, Tiongkok melakukan kerja sama militer dengan Kepulauan Solomon.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas yang diperoleh dari hasil riset dengan membaca berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti kemudian ingin memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya yang mengangkat topik Peralihan Hubungan Diplomatik Kepulauan Soomon dari Taiwan ke Tiongkok. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bersumber dari berbagai bahan bacaan, untuk itu bagi peneliti selanjutnya diharap dapat melakukan penelitian secara lebih

mendalam dengan melakukan wawancara dengan berbagai narasumber yang dapat mendukung data dan argumentasi dalam penelitian.

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pisau analisis yang lebih signifikan sehingga dapat membahas topik terkait peralihan hubungan diplomatik Kepulauan Solomon dari Taiwan ke Tiongkok secara lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aqorau, Transform, 2021. "Solomon Islands Foreign Policy Dilemma and The Switch from Taiwan to China", *The China Alternative*. Australia: ANU Press.
- Breuning, Marijke.(2007). *Foregin Policy Analysis: A Comparative Introduction*, New york: Palgrave Macmillan.
- Holsti, 1992. Politik Internasioanal: Suatu Kerangka Analisis. Dalam DR.A.A Banyu Perwita dan Dr. Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Hubungan Internasioanal*. (Bandung, PT .Remaja Rosda Karya)
- Holsti, (2006). *Making America Foreign-Policy* New York:Routledge.
- Holsti. KJ, 1987, *Politik Internasional Kerangka Analisis*, Bandung, Bina Cipta.
- Holsti. KJ. (1995). *Internasional Politics: Framework of Analysis*. London: *Prentice Hall Internasional*.
- Holsti dan Jervis. (2005), *American Foreign Policy*, New York Routledge.
- Jack C Plano dan Roy Olton, dalam DR.A.A Banyu Perwita dan DR. Yanyan Mochamad Yani (2005) *Pengantar Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Routledge. Holsti, dan Jervis. (2005). *American Foreign-Policy*, New York Routledge. James N. Rosenau et al., *World Politics: An Introduction*, (New York: *The Free Pres 1976*) ,18.
- Sahir, S.H. (2021) *Metode Penelitian*, Medan : KBM Indonesia
- Syafrida Hafni Sahir (2021) "Metodologi penelitian" KBM INDONESIA: Medan.
- Perwita & Yani. (2005). *Pengantar Hubungan Internasional*, Bandung: Remaja Rosda.
- Plano, J dan Olton, R. 2015, dalam DR.A.A Banyu Perwita dan DR. Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Hubungan Internasional*. Bandung, PT. Remaja Rosda Karya. Hal 49.
- Wiratama, K. A., Priadarsini, N. W. R., & Suwecawangsa, A. P. Faktor Pendorong Kepulauan Solomon Menyepakati Kerja Sama Belt And Road Initiative (Bri) Dengan Tiongkok Pada Tahun

Jurnal

- Arry Bainus & Junita Budi Rachman, Kepentingan nasional dalam hubungan internasional. Volume 2, No. 2 *Journal of Internasional Studies*, 2018 (109-115).
- Alfi, Raihan dkk. (2023). Hubungan Tiongkok dan ASEAN: Upaya Tiongkok menjadi Kekuatan Hegemon di Asia Tenggara. *Jurnal Transborders: Vol. 7 (1)* hal 1-14.
- Dugis (2007) *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*. Halaman 20 Vol 2.
- Humprey Wangke (2015). Penguatan Pengaruh Tiongkok di Kawasan Asia Pasifik Melalui Pembentukan AIIB. *Jurnal Hubungan Internasional: Vol. VII, No 07* hal 5-8.
- Katong Ragawi Numadi (2023) *Cheque Book Diplomacy di Balik Kebijakan Peralihan Hubungan Diplomatik Solomon Island dari Taiwan ke Tiongkok pada Tahun 2019*, *Jurnal Hubungan Internasional Universitas Bali Internasional Vol 16 (2)*.
- Nadjiha, Siti (2020). Persaingan Cina Australia dalam Perebutan Pengaruh di Kawasan Asi Pasifik. *Jurnal Asia Pasific Studies: vol. 4 (1)* hal 33-45.
- Numadi, K. R. (2023). *Cheque Book Diplomacy di Balik Kebijakan Peralihan Hubungan Diplomatik Kepulauan Solomon dari Taiwan ke Tiongkok pada Tahun 2019*. *Jurnal Hubungan Internasional, 16(2)*.
- Oktavia, Kinanti dkk (2023) Pengaruh Covid-19 terhadap Perekonomian setiap Negara Menggunakan Python. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan: Vol 9 (20)* hal 425-436.
- Putri, Adinda Normala (2020). Persaingan Pengaruh di Pasifik Selatan: Pengalihan Dukungan Diplomatik Kepulauan Solomon dari Taiwan ke Tiongkok. *Jurnal Asia Pasifik Studies: Vol. 3 (2)* hal 130-144.
- Putri, A. N. (2019). Persaingan Pengaruh Di Pasifik Selatan: Pengalihan Dukungan Diplomatik Kepulauan Solomon Dari Taiwan Ke Tiongkok. *Jurnal Asia Pacific Studies, 3(2)*, 130-144.

Skripsi

- Aqorau, Transform. 2021. *Solomon Islands' Foreign Policy Dilemma and the Switch from Taiwan to China in The China alternative: changing regional order in the Pacific Islands*, by Graeme Smith and Terence Wesley-Smith (eds). Canberra: Australian National University Press

Charilia Riantanti Pramitha, Skripsi :*Bantuan Official Development Assistance (ODA) Tiongkok sebagai Penyebab Peralihan Pengakuan Diplomatik dari Taiwan ke Tiongkok oleh Kepulauan Solomon dan Kiribati*". Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2021.

Chevalier, Christopher. 2022. *Understanding 'Solo': A biography of Solomon Mamaloni*. Canberra: Australian National University.

Lestari, Bunga. 2022. *Upaya Tiongkok dalam Mengalihkan Dukungan Diplomatik Kepulauan Solomon*. Padang: Universitas Andalas.

Santoso, V. A., Windiani, R., & Paramasatya, S. (2021). *Kompetisi Diplomasi: Taiwan (ROC) versus Tiongkok (PRC) di Kepulauan Solomon tahun 2016- 2019/10/HI/2021* (Doctoral dissertation, Faculty of Social and Political Science).

Spicah Virginia Tatiwakeng (2018) "*Kebijakan Luar Negeri Presiden Duterte Dan pengaruhnya Terhadap Hubungan Bilateral Filipina-Amerika Serikat*" Salatiga : Universitas Kristen Satya Wacana. Tatiwakeng, S. V. (2018). *Kebijakan Luar Negeri Presiden Duterte dan Pengaruhnya terhadap Hubungan Bilateral Filipina-Amerika Serikat* (Doctoral dissertation, Program Studi Hubungan Internasional FISKOM-UKSW).

Victoria Amandani Santoso (2021) "*Kompetisi Diplomasi : Taiwan (ROC) Versus Tiongkok (PRC) di Kepulauan Solomon Tahun 2016-2019*" Semarang: Universitas Diponegoro.

Wiratama, Kadek Andhika, Ni Wayan Rainy Priadarsini, and Adi Putra Suwecawangsa. "Faktor Pendorong Kepulauan Solomon Menyepakati Kerja Sama Belt And Road Initiative (BRI) Dengan Tiongkok Pada Tahun."

Website

Antara news (2023) 'CGTN: China, Kepulauan Solomon jalin kemitraan komprehensif dan strategis demi meningkatkan hubungan kedua negara' Antara news: dapat diakses di <https://www.antarane.ws.com/berita/3632814/cgtn-china-kepulauan-solomon-jalin-kemitraan-komprehensif-dan-strategis-demi-meningkatkan-hubungan-kedua-negara> pada 05 Oktober 2024.

Batley, James, 2016. "Constituency Development Funds in Solomon Islands". Diakses pada https://dpa.bellschool.anu.edu.au/sites/default/files/publications/attachments/2016-07/ib2015.67_batley.pdf tanggal 15 Juli 2024.

CIDCA (2021) Solomon Islands Receives Chinas sinophams COVID-19 Vaccines,

diakses pada http://en.cidca.gov.cn/2021-04/16/c_611936.htm, tanggal 25 September 2024

CNBayArea. 2023. 'Guangdong Establishes Sister-Province Relationship with Guadalcanal Province of Solomon Islands' Guangdong-Hongkong-Macao Greater Bay Area: diakses di https://www.cnbayarea.org.cn/english/News/content/post_1057659.html pada 30 September 2024.

Dapartemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia, "*Definisi Kepentingan Nasional*," <https://www.dfat.gov.au/about-us/publications/corporate/defining-national-interest>.

Daniel Hurst, "Perjanjian keamanan dengan China 'diparaf' oleh kedua negara, kata Kepulauan Solomon," *The Guardian*, 31 Maret 2022, <https://www.theguardian.com/>.

Elman, Miriam Fendius, 2015. "The Foreign Policy of Small States: Challenging Neorealism in Its Own Backyard" [online]. Diakses pada <http://www.maihold.org/mediapool/113/1132142/data/Fendius.pdf> tanggal 14 Juli 2024

Global Times, 2022. "Chinese Aircraft Arrived in Solomon Islands with Anti Epidemic Supplies".diakses pada <https://www.globaltimes.cn/page/202202/1252588.shtml> tanggal 15 Juli 2024

Hollingsworth, Julia, 2020. "The Pacific Islands Province is Frustrated with China's Presence That it's Pushing for Independence". In <https://edition.cnn.com/2020/09/17/asia/solomon-islands-malaita-intl-hnk-dst/index.html>

Karambelkar, Amruta, 2022. "The China-Solomon Islands Bilateral Security Pact". Diakses pada <https://www.vifindia.org/sites/default/files/The-China-Solomon-Islands-Bilateral-Security-Pact.pdf> tanggal 14 Juli

Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2022. "Cooperation between China and the Pacific Islands Countries. Diakses pada https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/202205/t20220524_10691917.html tanggal 14 Juli 2024

Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2022. "Eight Pronged Important Consensus Reached by China and Solomon Islands". In https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/202205/t20220527_10693484.html tanggal 14 Juli 2024

Mampiooper, Domnggus A. 2024 "Kerja Sama antara Provins Gualdalcanal

Solomon dan Tiongkok sudah terjalin lima tahun” Jubi.Id: diakses di <https://jubi.id/pasifik/2024/kerja-sama-antara-provinsi-guadacanal-solomon-dan-tiongkok-sudah-terjalin-lima-tahun/> pada 30 September 2024.

Natalie Whiting, Christina Zhou, Kai Feng. 2019. ‘What does it take for China to take Taiwan’s Pacific allies? Apparently, \$730 million’ diakses di <https://www.abc.net.au/news/2019-09-18/solomon-islands-cuts-ties-with-taiwan-in-favour-of-china/11524118> pada 30 September 2024.

Nick Sas (2024) Solomon Islands' pro-China leader Manasseh Sogavare withdraws from race to be next prime minister, diakses pada <https://www.abc.net.au/news/2024-04-29/solomon-islands-manasseh-sogavare-to-step-down-as-pm-candidate/103781462> tanggal 12 Juli 2024

OEC (2022) ‘Solomon Island-China’ OEC: dapat diakses di <https://oec.world/en/profile/bilateral-country/slb/partner/chn> pada 4 Oktober 2024.

OEC (2022) Solomon Islands-China Bilateral, diakses pada <https://oec.world/en/profile/bilateral-country/slb/partner/chn>, tanggal 24 September 2024.

Politic Geography Now, 2019. “Map: Which Countries “Recognize” Taiwan in 2019?”, 23 September 2019, [daring]. Tersedia dalam [<https://www.polgeonow.com/2018/07/map-which-countries-recognize-taiwan.html>] Dikses pada 4 Oktober 2024.

“Rekap Pertemuan Tingkat Menteri Mitra di Blue Pacific (PBP)” (transkrip pengarahan, Departemen Luar Negeri AS, 22 September 2022), <https://www.state.gov/> .

SIBC. 2023. ‘Guadalcanal Province Signs MOU with China’s Guangdong Province’ Solomon Islands Broadcasting Corporation: dapat diakses di <https://www.sibconline.com.sb/guadalcanal-province-signs-mou-with-chinas-guangdong-province/> pada 30 September 2023

Solomon Times, 2019. “Statement by the Prime Minister Hon. Manasseh Sogavare on Switch to China, transkrip”, 20 September 2019, [daring] Tersedia dalam [<https://www.solomontimes.com/news/statement-by-the-prime-minister-hon-manasseh-sogavareon-switch-to-china/9362>] diakses pada 04 Oktober 2024

Solomon Start (2021) *Guandalcanal Province sign historical sister-relations with Guangdong Province*, diakses pada, tanggal 24 September 2024

Solomon Islands Government, 2020. “PRC Hands 2,5 million USD in Cash to

Fight Covid-19”. Diakses pada <https://solomons.gov.sb/prc-hands2-5m-in-cash-grant-to-fight-covid-19/> tanggal 15 Juli 2024

Smith, G., 2019. “The wisdom of Solomons: Taiwan and China’s Pacific power play”, Lowy Institute, 12 September 2019, [daring]. Tersedia dalam [<https://www.lowyinstitute.org/theinterpreter/wisdom-solo-mons-taiwan-and-china-s-pacificpower-play>] diakses pada 04 Oktober 2024

Trading Economi (2024) ‘China Export to Solomon Islands’ Trading Economic: dapat diakses di <https://tradingeconomics.com/china/exports/solomon-islands> pada 04 Oktober 2024.

UN WOMEN ,“Pulau Solomon”,https://asiapacific-unwomen-org.translate.goog/en/countries/fiji/co/solomonislands?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc#1_anc. Diakses pada 20 Maret 2024.

VOA Indonesia (2024) “China Gelontorkan \$20 Juta untuk Kepulauan Solomon” VOA Indonesia: dapat diakses di <https://www.voaindonesia.com/a/china-gelontorkan-20-juta-untuk-kepulauan-solomon/7700132.html> pada 1 Oktober 2024

World Bank (2022) International Debt Statistics 2022, diakses pada <https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/2d6b3d72-a763-5db8-bd8b-209a6a7fb384/content> tanggal 24 September 2024.

Zhang, Denghua, 2019. “*Comparing China and Taiwan Aid to Pacific*”. Di akses pada https://openresearchrepository.anu.edu.au/bitstream/1885/186125/1/ib_2019_20_zhang_final.pdf tanggal 14 Juli 2024

Zhang, D. (2021). *China–Pacific Tourism Engagement: Opportunities and Challenges*.